

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berkembang akan selalu mengalami permasalahan yang sangat kompleks mengenai kemiskinan. Hal ini menjadi topik yang paling banyak dibicarakan oleh setiap kalangan mulai dari pejabat tinggi sampai kepada tokoh masyarakat. Banyak langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan, sehingga individu mendapat penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, langkah ini dinilai kurang efektif karena faktanya, kemiskinan tidak berkurang melainkan semakin bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 31.023.390 jiwa untuk penduduk di desa dan di kota atau mencapai 13,33% per Maret 2009 sampai Maret 2010. Angka kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan di kota. Untuk data kemiskinan di Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Garut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2007 sampai 2009 mengalami penurunan meskipun jumlah penduduk cenderung meningkat. Sebanyak 15,35% atau 365.392 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Garut untuk tahun 2009. Ini merupakan persentase terkecil apabila dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan salah satunya adalah program nasional yang dilaksanakan hampir diseluruh Indonesia. Program tersebut yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dengan menitikberatkan rumah tangga miskin (RTM) sebagai targetnya.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sehubungan dengan dana PNPM Mandiri Pedesaan diperoleh dari bantuan pemerintah, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas pengelolaan dana-dana yang bergulir yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, serta sebagai bahan laporan kepada pemerintah dan sebagai bukti kepercayaan kepada masyarakat.

Banyak hasil yang dicapai dari adanya PNPM Mandiri Pedesaan sejak berdiri tahun 2007, diantaranya:

1. Tingginya tingkat pengembalian investasi. Menurut evaluasi ekonomi independen, bobot pengembalian investasi PNPM Mandiri Pedesaan berkisar antara 39-68%.
2. Penghematan biaya dalam jumlah signifikan.

Program yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu di bidang sarana/prasarana, peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi dan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Dalam menjalankan program tersebut, banyak pelaku yang terlibat di dalamnya. Mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat kecamatan. Salah satu pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat kecamatan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, dimana salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana, setiap unit manapun akan mengalami permasalahan termasuk UPK mulai dari pengeluaran dana sampai kepada

penerimaannya. Dalam pelaksanaannya, UPK dituntut untuk menggunakan dana yang efisien. Efisien yang dimaksud adalah efisiensi yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Efisiensi operasional adalah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik akan tetapi unit usaha tersebut harus beroperasi dengan efisien. Efisiensi operasional berkaitan dengan biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Yayuk Wuriati (2008), Institut Pertanian Bogor (IPB) dari 300 UPK, menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknik lembaga UPK dalam mengelola kredit mikro adalah 0,368. Sebanyak 15 UPK dikatakan sangat efisien dimana sebagian besar berada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kabupaten Garut
Rasio Biaya Operasional Tahun 2010

No.	Bulan	Jumlah Kec.	Biaya Operasional	Pendapatan Operasional	%
1	Mei	31	1,449,210,561	2,703,659,601	54%
2	Juni	30	1,363,169,182	2,929,240,488	47%
	Jumlah		2,812,379,743	5,632,900,089	50%

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut

Dari tabel rasio biaya operasional di atas menunjukkan bahwa, efisiensi UPK di Kabupaten Garut dinilai ideal dikarenakan persentase menunjukkan angka

tidak lebih dari 60% walaupun tidak dipungkiri bahwa terjadi penurunan rasio dari bulan sebelumnya.

Di bawah ini adalah besarnya tunggakan pinjaman untuk usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada UPK di Kabupaten Garut berdasarkan kolektibilitasnya.

Table 1.2
Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kabupaten Garut
Laporan Kolektibilitas sampai dengan Desember 2009

Tingkat Kolektibilitas	UEP	SPP	Total
Kolektibilitas I	Rp 3,297,612,427	Rp 12,492,695,504	Rp 15,790,307,931
Kolektibilitas II	Rp 1,180,040,790	Rp 1,174,360,939	Rp 2,354,401,729
Kolektibilitas III	Rp 349,359,981	Rp 274,994,740	Rp 624,354,721
Kolektibilitas IV	Rp 369,773,350	Rp 135,088,184	Rp 504,861,534
Kolektibilitas V	Rp 602,696,662	Rp 264,324,922	Rp 867,021,584
Total	Rp 5,799,483,210	Rp 14,341,464,289	Rp 20,140,947,499

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut

Dengan besarnya tunggakan pinjaman, maka hal yang dipertanyakan adalah bagaimana kualitas kredit pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menyebutkan bahwa “Kualitas Kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet”. Dari 5 kelas tersebut bisa disebut untuk kategori lancar adalah kolektibilitas I, untuk kategori dalam perhatian khusus adalah kolektibilitas II, untuk kategori kurang lancar adalah kolektibilitas III, untuk kategori diragukan adalah kolektibilitas IV, dan untuk kategori macet adalah kolektibilitas V.

Permasalahan yang timbul dari besarnya tunggakan kredit adalah akan mempengaruhi dana yang disalurkan untuk periode selanjutnya. Hal ini akan berdampak kepada berkurangnya laba yang diperoleh. Agar besarnya dana yang disalurkan untuk kredit tidak mengalami penurunan karena diakibatkan oleh kredit bermasalah, maka salah satu hal yang dapat ditempuh adalah dengan penggunaan dana yang efisien. Apabila pengalokasian dana tidak efisien maka akan menyebabkan penyaluran kredit berkurang. Hal ini dikarenakan jumlah modal berkurang sehingga dana yang disalurkan akan berkurang untuk periode berikutnya.

Penggunaan biaya yang efisien dan kualitas kredit yang baik akan berdampak kepada profitabilitas yang diperoleh. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Gozali (2007: 72) yaitu "...dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar."

Menurut Munawir (2001: 65) "profitabilitas ialah keefektifan operasi serta derajat keuangan suatu perusahaan." Keefektifan yang dimaksud mengandung pengertian bahwa adanya keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas suatu unit usaha didasarkan pada pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Berikut adalah profitabilitas pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan:

Tabel 1.3
Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kabupaten Garut
Tingkat Profitabilitas sampai dengan Desember 2009

No	Kecamatan	Surplus/Defisit Ditahan	Surplus/Defisit Berjalan
1	Talegong	Rp 244,674,466	Rp 14,796,191
2	Mekarmukti	Rp (63,334,676)	Rp 17,957,679
3	Melangbong	Rp -	Rp (9,135,334)
4	Peundeuy	Rp -	Rp (2,336,822)
5	Sucinaraja	Rp -	Rp (965,006)
6	Sukaresmi	Rp -	Rp 18,663,573
7	Cisewu	Rp 370,038,100	Rp 144,490,883
8	Singajaya	Rp 310,833,949	Rp 132,103,298
9	Bungbulang	Rp 167,178,457	Rp 60,388,968
10	Cilawu	Rp -	Rp 56,344,780
11	Pemulihan	Rp 272,330,877	Rp 103,292,132
12	Cisompet	Rp 480,218,616	Rp 116,824,905
13	Cibalong	Rp 332,431,789	Rp 221,159,288
14	Pakenjeng	Rp -	Rp 263,405,643
15	Banjarwangi	Rp 122,399,815	Rp 122,906,571
16	Samarang	Rp 257,138,111	Rp 134,158,951
17	Cisurupan	Rp 636,194,398	Rp 202,928,939
18	Cihurip	Rp -	Rp (14,822,995)
	Jumlah	Rp 3,130,103,902	Rp 1,582,161,644

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel di atas, tingkat profitabilitas UPK di Kabupaten Garut sepanjang tahun 2009 cukup tinggi dengan persentase mencapai 51%. Besarnya nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara pendapatan dan penerimaan secara keseluruhan yaitu sebanyak 18 kecamatan.

Gelos (dalam Adnan Buyung Nusantara, 2009: 19) menunjukkan bahwa 'semakin tinggi biaya pendapatan maka bank menjadi tidak efisien sehingga ROA makin kecil'. Dimana ROA merupakan indikator dari profitabilitas.

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ida Savitri Kusmargiani. 2006. Tesis. Universitas Diponegoro. Analisis Efisiensi Operasional dan Efisiensi Profitabilitas pada Bank yang Merger dan Akuisisi di Indonesia (Studi pada Bank Setelah Rekapitalisasi dan Restrukturisasi Tahun 1999-2002).	Tidak adanya perbedaan efisiensi operasional dan efisiensi profitabilitas sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.	Variabel yang digunakan sama yaitu efisiensi operasional dan profitabilitas.	1. Tidak adanya variabel mengenai kualitas kredit, 2. Pada penelitian tersebut diolah dengan metode DEA (<i>Data Evelopment Analysis</i>), 3. Pengujian hipotesis pada penelitian tersebut dengan uji Peringkat Tanda Wilcoxon.
2.	Yuliani. 2007. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Universitas Sriwijaya. Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta.	Secara bersama-sama/simultan efisiensi operasional mampu memberikan kontribusi terhadap variabel terikatnya (ROA) adalah 79,2%.	1. Variabel yang digunakan sama yaitu efisiensi operasional dan profitabilitas, 2. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji T, dan secara simultan menggunakan uji F.	Indikator pada profitabilitas yang digunakan pada penelitian tersebut adalah ROA,
3.	Ahmad Buyung Nusantara. 2009. Tesis. Universitas	Pada bank go publik variabel NPL berpengaruh	1. Indikator yang digunakan pada variabel	1. Indikator pada profitabilitas yang

	Dipenogoro. Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007).	signifikan negatif terhadap variabel ROA sebesar 0,039, sedangkan variabel BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA sebesar 0,035.	X sama yaitu BOPO dan NPL, 2. Uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji secara parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama.	digunakan pada penelitian tersebut adalah ROA, 2. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.
4.	Hidayat. (2010). Efektivitas Pengelolaan Kredit dan Pengaruhnya Terhadap profitabilitas (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Pundhi” Kabupaten Nganjuk).	Berdasarkan hasil analisis rasio profitabilitas <i>net profit margin</i> yang dicapai Koperasi Simpan Pinjam “Artha Pundhi” Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kurang baik karena masih di bawah standar tingkat bunga Bank Indonesia. Ini berarti koperasi dalam mengolah dananya kurang efisien.	Menggunakan indikator yang sama pada variabel profitabilitas yaitu <i>profit margin</i> .	Tidak dibahas variabel mengenai efisiensi operasional.

5.	Hendry Sihombing. (2006). Tesis. Universitas Padjajaran. Peranan Kualitas Kredit Terhadap Profitabilitas pada Bank BNI.	Dalam pengelolaan kualitas kredit mempunyai peranan dalam pencapaian tingkat profitabilitas, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan rasio NPL periode 2000-2002 diikuti dengan peningkatan rasio profitabilitas periode 2000-2002.	1. Pada kualitas kredit indikator yang digunakan sama yaitu NPL, 2. Menggunakan metode deskriptif.	Indikator pada profitabilitas yang digunakan pada penelitian tersebut adalah ROE dan ROA.
----	---	---	---	---

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: Pengaruh Efisiensi Operasional dan Kualitas Kredit Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut?

2. Bagaimana kualitas kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut?
3. Bagaimana profitabilitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut?
4. Bagaimana pengaruh efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun simultan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas dan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kredit Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.

3. Untuk mengetahui bagaimana profitabilitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun simultan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

a. Kegunaan Akademis

1. Menerapkan teori pengaruh efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas.
2. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.
3. Penulis dapat mengetahui gambaran tentang efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.

4. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut.
5. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut mengenai efisiensi operasional, kualitas kredit dan profitabilitas.
2. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas.
3. Sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen pada PNPM Mandiri perdesaan untuk berhati-hati dalam menanamkan dan menyalurkan kredit sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya rumah tangga miskin.
4. Bagi pengambil kebijakan (manajemen) PNPM Mandiri Perdesaan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan profitabilitas.